

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

DPR merupakan representasi dari pada rakyat atau aspirasi rakyat, juga memiliki peran sebagai pembentuk/pembuat Undang-Undang (Legislator), sehingga membuat DPR memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Aspirasi rakyat sangat penting untuk didengar dan dilaksanakan oleh para wakil rakyat yang telah terpilih, karena ini merupakan salah satu harapan besar masyarakat terhadap DPR sebagai perwakilan dari pada rakyat itu sendiri. Latar belakang pendidikan anggota dewan legislatif merupakan atribut penting bagi DPR. Karena dengan mengetahui latar belakang pendidikan anggota DPR, dapat menentukan posisi anggota DPR yang sesuai dengan porsinya sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dapat lebih baik. Konsekuensi logis dari upaya membangun DPR yang produktif dalam melahirkan produk hukum yang baik tentu dengan tingginya kompetensi dan kualitas anggota DPR. Karena sejatinya pendidikan merupakan kunci dalam pembangunan suatu negara, sehingga semakin berkembang dan majunya peradaban dalam suatu negara, maka semestinya diikuti oleh kualitas pendidikan yang semakin meningkat dan baik. Mari kita lihat jika dikaitkan dengan prinsip demokrasi.

Socrates dalam tulisan (Plato, 2022) di buku Republik terlihat sangat membenci sistem demokrasi di Athena. Plato menggambarkan socrates terlibat dalam percakapan dengan seorang karakter bernama Adeimantus dan mencoba

membuatnya melihat cacat yang ada dalam demokrasi, dengan membuat alegori kapal sebagai simbolisasi negara.

Socrates bertanya *"jika kamu melakukan perjalanan melalui laut, siapa idealnya yang diinginkan untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab atas kapal tersebut? hanya sembarang orang atau orang-orang terdidik dalam aturan dan tuntutan pelayaran,"* tanya Socrates.

Adeimantus menjawab *"orang-orang terdidik dalam aturan dan tuntutan pelayaran,"* namun Socrates bertanya lagi *"jadi mengapa kita terus berfikir bahwa sembarang orang harus di anggap cocok, untuk menilai siapa yang harus menjadi penguasa sebuah negara".*

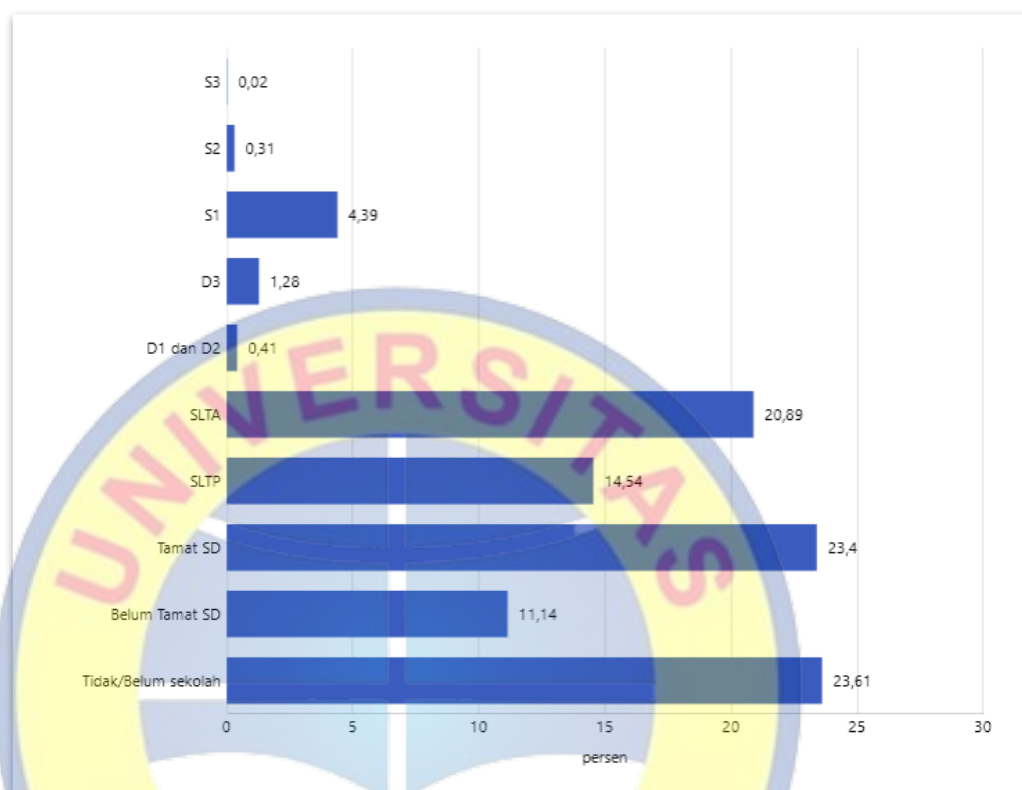
Dengan alegori ini Socrates menunjukkan bahwa hanya individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang keadilan dan kebaikan yang seharusnya diberi tanggung jawab untuk memimpin atau mengelola negara. Socrates menekankan bahwa memilih dalam sebuah pemilihan adalah keterampilan bukan hanya mengikuti insting. Dalam sistem demokrasi, dimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Socrates dan Plato melihat potensi masalah ketika individu yang tidak terinformasi atau kurang bijaksana diberikan kekuasaan yang sama dalam membuat keputusan seperti mereka yang lebih terinformasi atau bijaksana dalam pandangannya. Tanpa dasar pemikiran filosofis dan moral yang solid, demokrasi dapat dengan mudah tergelincir menjadi tirani mayoritas atau demagogi.

Pada dasarnya demokrasi yang berjalan saat ini dilihat dan dihitung dari seberapa banyak orang yang mempunyai massa dan pengaruh yang kuat dalam mengendalikan politik itu sendiri dan masyarakat masih mentokohkan seseorang seperti tokoh agama ataupun budayawan daerah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan secara formal tapi mampu mempunyai kebijakan diantara orang banyak, namun tidak sedikit juga masyarakat yang terbawa oleh kekuatan orang-orang yang punya pengaruh dalam finansial atau para calon yang menggunakan *politic money* untuk mendapat massa dan suara yang kuat. Lantas apakah itu yang mendorong pencalonan anggota parlemen yang diusung partai?

Beberapa fenomena yang terjadi dalam pemilihan umum tahun 2024 dari mulai artis berani maju sebagai wakil rakyat menjadi fenomena penting dalam pemilu tahun ini, mulai dari cara mereka berkampanye dan berargumentasi meyakinkan personal branding yang ia bangun walaupun banyak juga yang tidak dibekali ilmu politik secara mendasar. Lantas apakah partai melihat faktor pendidikan sebagai strategi komunikasi politik untuk menunjang keberhasilannya? Berikut contoh beberapa artikel serta kutipan yang mengkaitkan dengan fenomena pendidikan :

Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), penduduk Indonesia berjumlah 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Juni S3: 61.271 jiwa (0,02%). S2: 855.757 jiwa (0,31%). S1: 12.081.571 jiwa (4,39%). D3: 3.517.178 jiwa (1,27%). D1 dan D2: 1. 126.080 jiwa (0,4%) Total Hanya 6.39% dari total Penduduk Indonesia yang Kuliah. Sisanya 93.61% Belum mengenyam pendidikan lanjutan SLTA: 57.533.189 jiwa, SLTP: 40.035.862 jiwa, Tamat SD: 64.446.545 Jiwa Belum Tamat SD: 30.685.363 jiwa

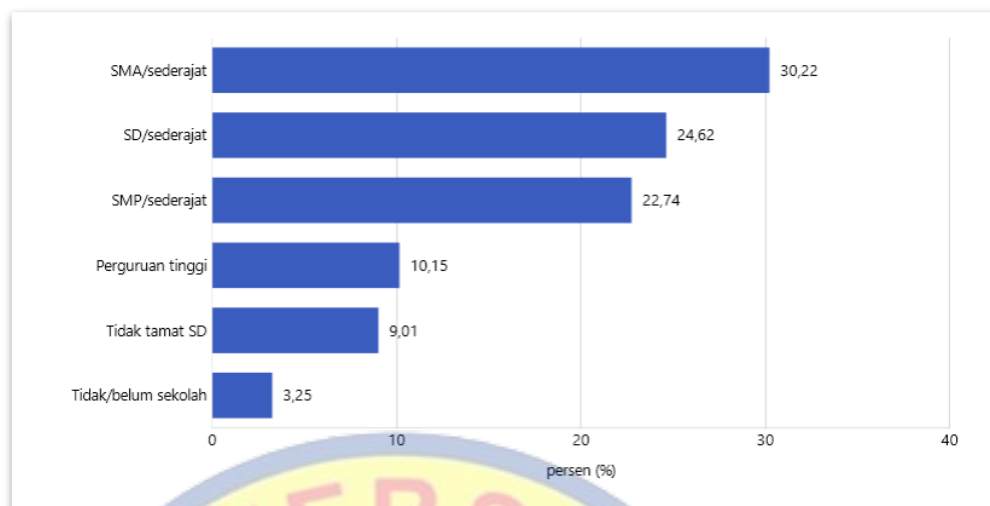
Tidak/Belum sekolah: 65.018.451 jiwa Total Jumlah Penduduk Indonesia:  
275,36 juta jiwa (Juni 2022)



**Gambar 1.1 Data Pendidikan Dukcapil Juni 2022**

Sumber : Katadata.co.id

Walaupun ada peningkatan pada tahun 2023 Tamatan pendidikan terbanyak berasal dari SMA/ sederajat dengan persentase 30,22% pada Maret 2023. Kedua terbanyak adalah lulusan SD/ sederajat, dengan capaian 24,62%. Disusul oleh jenjang sekolah SMP/ sederajat sebanyak 22,74%. Sementara perguruan tinggi proporsinya hanya 10,15% pada Maret 2023. Di samping itu, persentase yang tidak tamat SD/ sederajat dan belum pernah sekolah cukup tinggi, masing-masing sebesar 9,01% dan 3,25%. (Viva Budy Kusnandar, 2022).



**Gambar 1.2 Data Pendidikan Menurut Susenas Oleh BPS Pada Maret 2023**

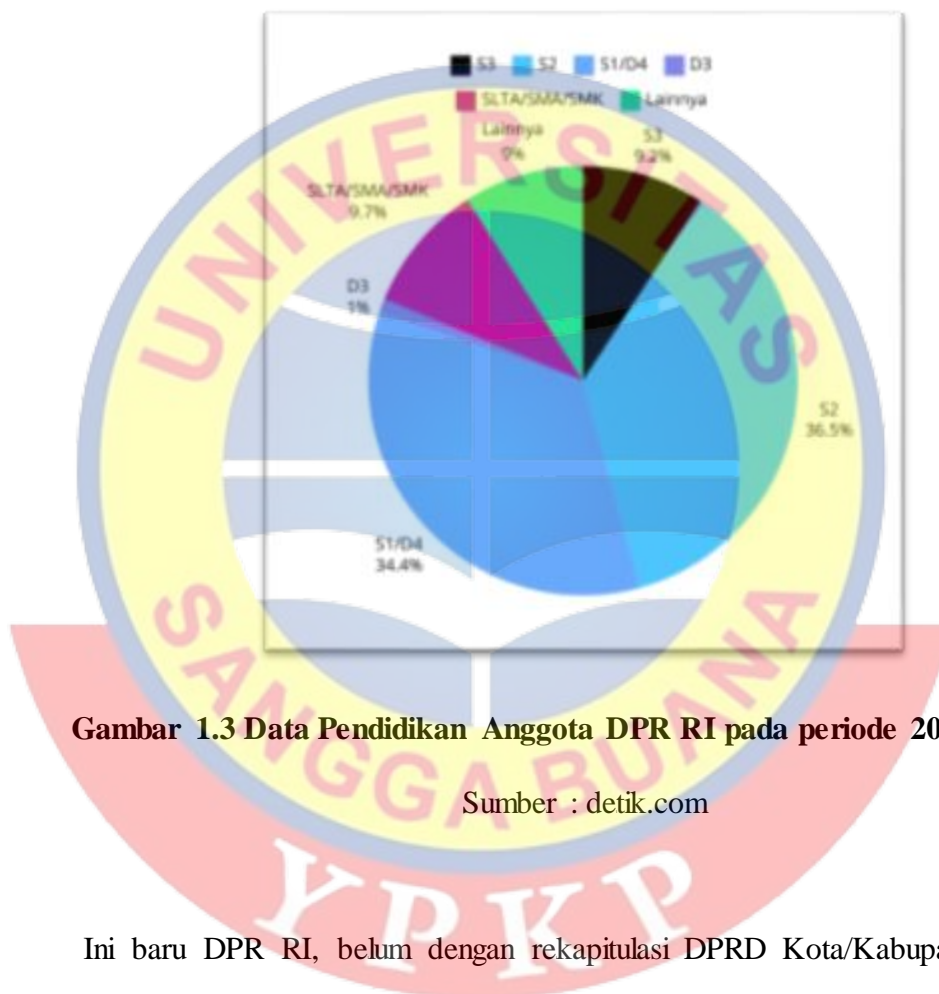
Sumber : Katadata.co.id

Data ini diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS pada Maret 2023. Survei menyasar 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. (Muhamad Nabilah, 2023)

Padahal untuk jadi Negara maju, Jumlah Yang kuliah dan lulus, harus di atas 50%, 10 Negara yang berada pada kuantitas lebih dari 50% Warga Negeranya Kuliah adalah Korsel, Kanada, Rusia, Jepang, Irlandia, Amerika, Swiss, Austria, inggris, Belanda. Lantas jika demokrasi adalah sistem yang mengedepankan kerakyatan dalam mendapatkan hak yang sama, kenapa pendidikan masih jauh dan tidak seimbang dirasakan oleh masyarakat luas.

Dan jika kita merujuk latar belakang pendidikan para DPR RI pada periode 2019-2024 yang dirangkum oleh detik.com 575 anggota telah dilantik. Mereka datang dari beragam latar belakang pendidikan, lulusan SMA hingga S3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis data tentang anggota DPR terpilih 2019-

2024. Berdasarkan data tersebut, ada 56 anggota (9,7%) yang merupakan lulusan SMA. Selanjutnya, lulusan D3 sebanyak 6 anggota (1%), lulusan D4/S1 sebanyak 198 anggota (34,4%), lulusan S2 sebanyak 210 anggota (36,5%), dan lulusan S3 sebanyak 53 anggota (9,2%). Sementara itu, ada 52 anggota (9%) yang menempuh pendidikan lainnya. (Tsarina Maharani, 2019)



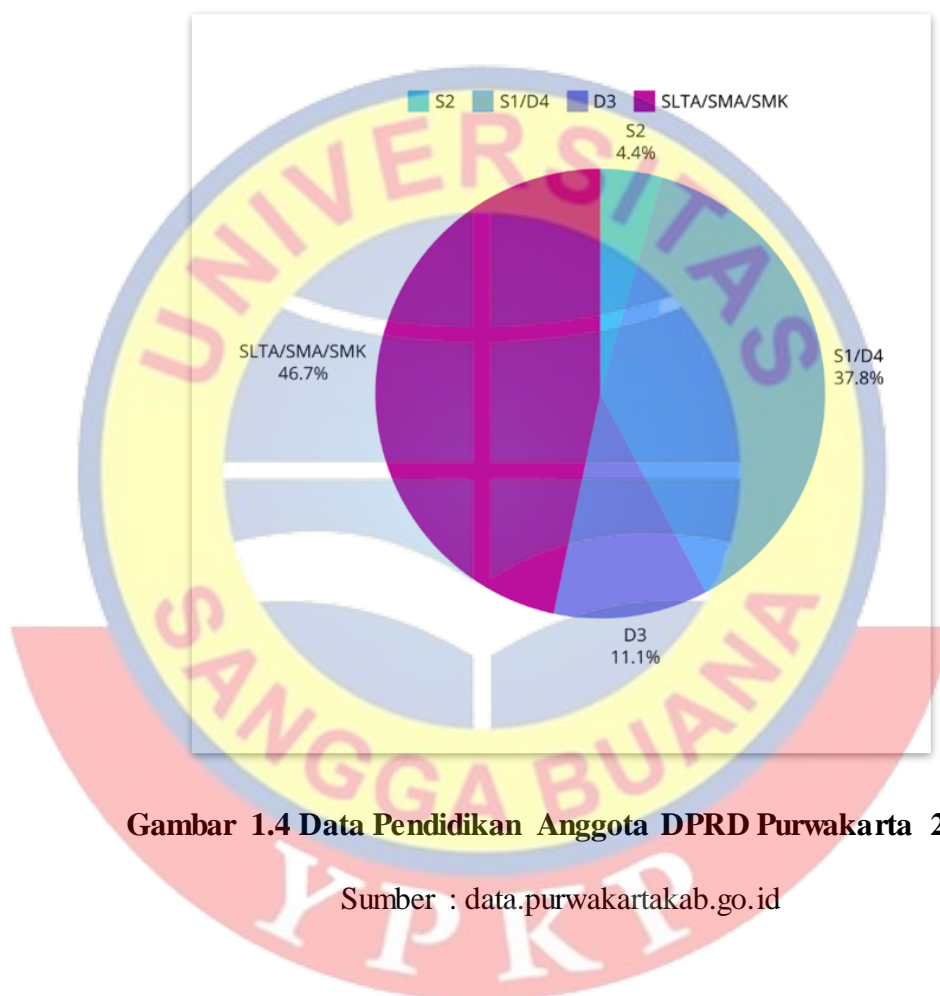
**Gambar 1.3 Data Pendidikan Anggota DPR RI pada periode 2019-2024**

Sumber : detik.com

Ini baru DPR RI, belum dengan rekapitulasi DPRD Kota/Kabupaten daerah setiap daerah, dalam penelitian skripsi ini penulis akan memfokuskan latar belakang pendidikan calon anggota legislatif di Kabupaten Purwakarta dan khususnya bagaimana melihat secara data dari Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta, serta tokoh muda Purwakarta.

Purwakarta sendiri merupakan daerah Kabupaten yang terhimpit antara dua Kota besar yaitu Jakarta dan Bandung serta populasi penduduk yang hampir mampu bersaing dengan kota-kota besar, termasuk dalam kancah politiknya.

Tidak dipungkiri pemahaman politik dari seseorang dilihat bagaimana seseorang tersebut bergelut dengan pengalamannya, mau itu dari pendidikan formalnya ataupun massa yang ada dibelakangnya. Lalu sejauh mana pendidikan mempengaruhi kualitas seseorang dan atau organisasi mempengaruhi pamor seseorang. Menurut sumber yang dikumpulkan oleh [data.purwakartakab.go.id](http://data.purwakartakab.go.id)



**Gambar 1.4 Data Pendidikan Anggota DPRD Purwakarta 2021**

Sumber : [data.purwakartakab.go.id](http://data.purwakartakab.go.id)

Pada tahun 2021 latar belakang pendidikan wakil rakyat daerah purwakarta 45 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Anggota yang menamatkan pendidikan formalnya adalah, SLTA/Sederajat berjumlah 21 orang, D3 berjumlah 5 orang, S1 berjumlah 17 orang, S2 berjumlah 2 orang, dan S3 tidak ada sama sekali. (Sekretariat Dewan, 2021)

Sedangkan dilain hal pendidikan (ormas) atau organisasi masyarakat Purwakarta ada 41 organisasi masyarakat yang terdaftar dan berpengaruh untuk mengakomodir massa sebagai modal nyaleg di Kabupaten Purwakarta yang dikendalikan oleh ketua atau pendiri organisasi tersebut atau seseorang yang ditokohkan oleh ormas tersebut. Lalu darimanakah para caleg Purwakarta belajar politik secara teori ataupun praktikal? Padahal menurut survey anak muda di Purwakarta lebih menyukai akademisi.



**Gambar 1.5 Data Pemilih Mayoritas Anak Muda Purwakarta**

Sumber : Instagram @GoodStats

Adapun survei yang dilakukan oleh GoodStats pada Desember 2023 bagi kaum muda di Purwakarta lebih suka caleg dari kalangan akademisi, dengan hasil survey; Akademisi 39,3% Politisi 25,7% Organisatoris 15,2% Pengusaha 6,9% Artis 1,2% dan 5,2% lainnya.

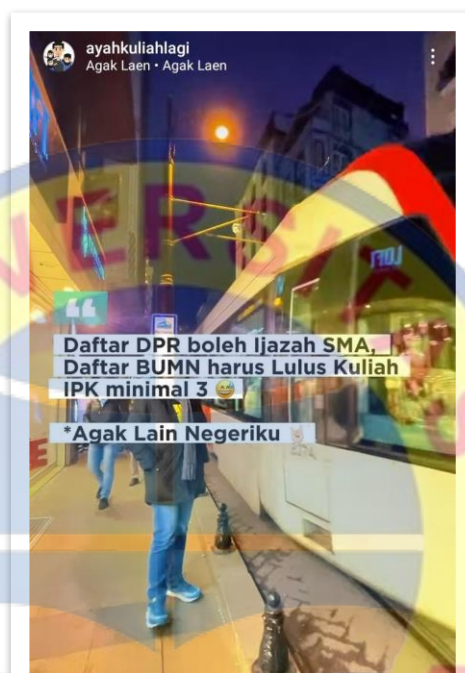


(GoodStats, 2024) Kalangan akademisi nyatanya masih menjadi harapan bagi para kaum muda daerah Purwakarta, hal tersebut berarti menunjukkan bahwa akademik seseorang mampu mempengaruhi kepercayaan orang lain. Dan apakah pendidikan mempengaruhi berjalannya sistem demokrasi yang dijalankan pemerintah khususnya daerah purwakarta? Sehingga dalam penelitian ini mampu menunjukkan hasil kongkret bahwa alat tukar jual dalam politik adalah gagasan yang ditempuh melalui pendidikan dan pengalaman.

Melihat caleg berdasarkan dengan tingkat pendidikan dapat melihat arah pembangunan atau pun visi misi dari caleg itu sendiri. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pembangunan atau pun kualitas dalam merencanakan manuver atau pun pembangunan kedepannya.

Dalam hal ini, kelompok pemuda merupakan pemilih terbanyak pada pemilu 2024. Kelompok pemuda (milenial) menjadi sasaran strategis melihat potensinya yang sangat besar hingga mencapai 56,45% atau sekitar 113 juta pemilih. Memahami preferensi politik kelompok muda dalam pemilu dan isu publik merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena pemegang suara terbanyak untuk pemilu 2024 dipegang oleh kelompok pemuda (milenial). Oleh karena itu, para calon caleg dituntut untuk kritis dan rasional dalam menyampaikan janji-janji politiknya, karena masyarakat pemilih didominasi oleh kelompok pemuda (milenial) yang lebih terdidik dan lebih baik dalam menilai calon-calon yang bersaing dalam pemilu. Mereka akan cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi janji-janji kandidat dan lebih mampu membedakan antara retorika politik dan rencana tindakan konkret. Dengan pemahaman masyarakat yang kuat tentang isu-isu politik, masyarakat lebih siap untuk berpartisipasi secara cerdas dalam proses pemilihan.

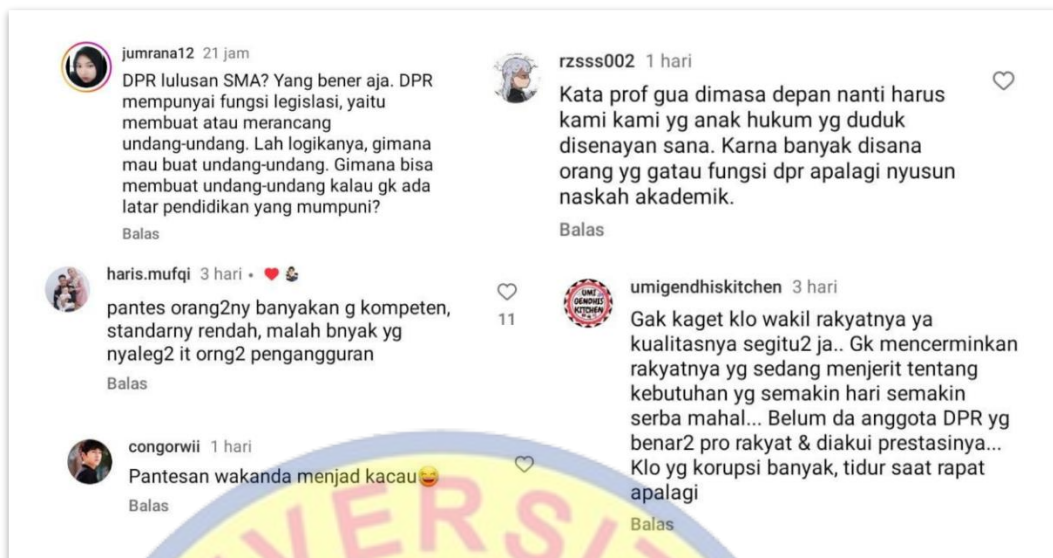
Terkait problematika ini juga beberapa masyarakat mengharapkan adanya peningkatan syarat minimal pendidikan calon anggota DPR. Dalam sebuah postingan Instagram salah satu akun @ayahkuliahlagi membuat video reels :



**Gambar 1.6** Postingan pada akun Instagram @ayahkuliahlagi

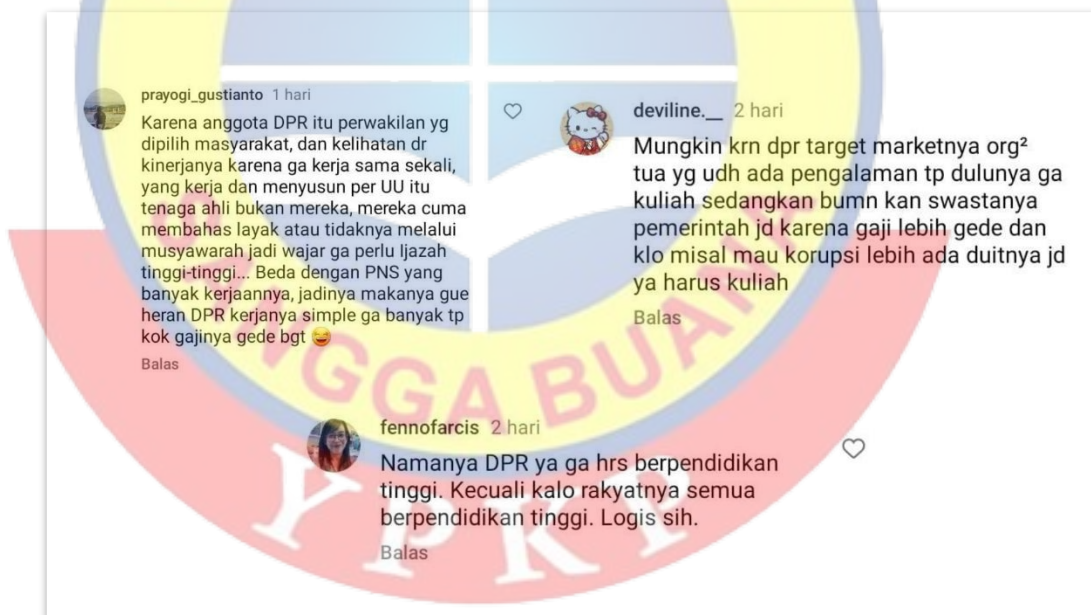
Sumber : Instagram @ayahkuliahlagi

Beberapa komentar dalam postingan tersebut memperlihatkan bagaimana respon masyarakat kebanyakan pun heran dan mempertanyakan terkait ketentuan yang berlaku untuk menjadi caleg di Indonesia. Hal itu dilihat dari komentar di postingan tersebut. (ayahkuliahlagi, 2024).



**Gambar 1.7** Komentar pada akun Instagram @ayahkuliahlagi

Sumber : Instagram @ayahkuliahlagi



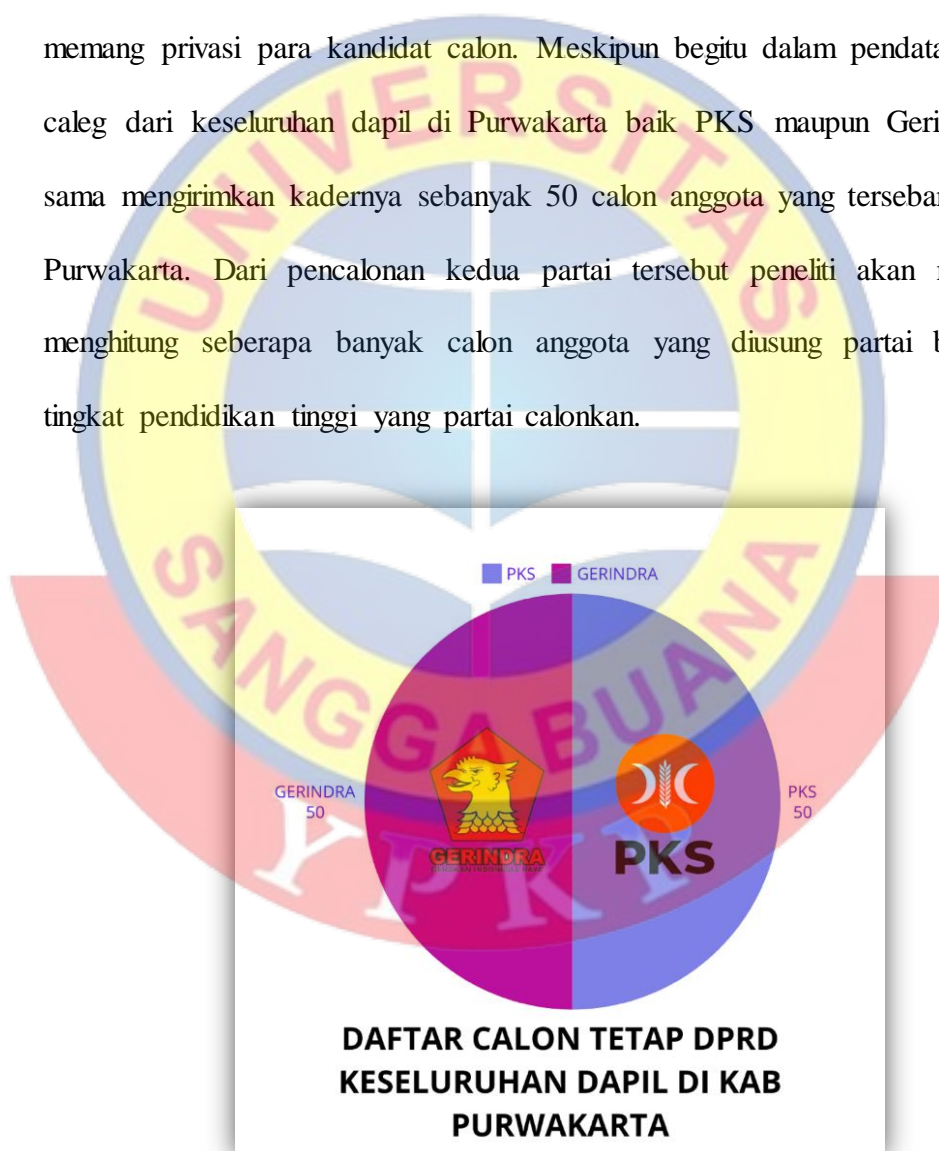
**Gambar 1.8** Komentar pada akun Instagram @ayahkuliahlagi

Sumber : Instagram @ayahkuliahlagi

Melihat pada pendataan daftar calon tetap DPRD Kab. Purwakarta partai yang menjadi obyek penelitian ini adalah partai PKS, dalam pendataan yang peneliti kumpulkan di website Kpu.go.id khususnya daerah Purwakarta terbagai 6 dapil. Hal menarik dilihat bagaimana PKS terang-terangan membuka profil

para calon yang diusungnya mulai dari alamat rumah hingga riwayat pendidikan dan organisasi bisa kita akses dengan bebas dan mengenal para kandidat calon tersebut.

Lain halnya sebagai perbandingan dengan partai Gerindra yang menutup akses untuk membuka profil para calon kadidat dalam pileg di Kab. Purwakarta hal tersebut diwajarkan oleh pihak KPU karena hal tersebut bisa dikatakan memang privasi para kandidat calon. Meskipun begitu dalam pendataannya total caleg dari keseluruhan dapil di Purwakarta baik PKS maupun Gerindra sama-sama mengirimkan kadernya sebanyak 50 calon anggota yang tersebar di 6 dapil Purwakarta. Dari pencalonan kedua partai tersebut peneliti akan melihat dan menghitung seberapa banyak calon anggota yang diusung partai berdasarkan tingkat pendidikan tinggi yang partai calonkan.



**Gambar 1.9 Daftar Data Calon Tetap dari 2 partai 6 Dapil di Purwakarta**

Sumber : info pemilu kpu.go.id



Gambar 1.10 Daftar Data Calon Lulusan Perguruan Tinggi dari PKS & Gerindra

Sumber : info pemilu kpu.go.id



Gambar 1.11 Daftar Data Partai & Calon Terpilih dari 6 Dapil di Purwakarta

Sumber : info metode sainte lague.

Namun dalam hasil pemilu di Purwakarta saat ini dari keseluruhan kursi yang diduduki para anggota PKS hanya mendapatkan 5 kursi dilansir dari sumber data *metode sainte lague* 50 anggota terpilih dari seluruh partai bahwa partai gerindralah yang memiliki kursi paling banyak dengan raihan 10 kursi. Namun daftar resmi tersebut akan dikeluarkan oleh pihak KPU setelah ditetapkan nantinya.

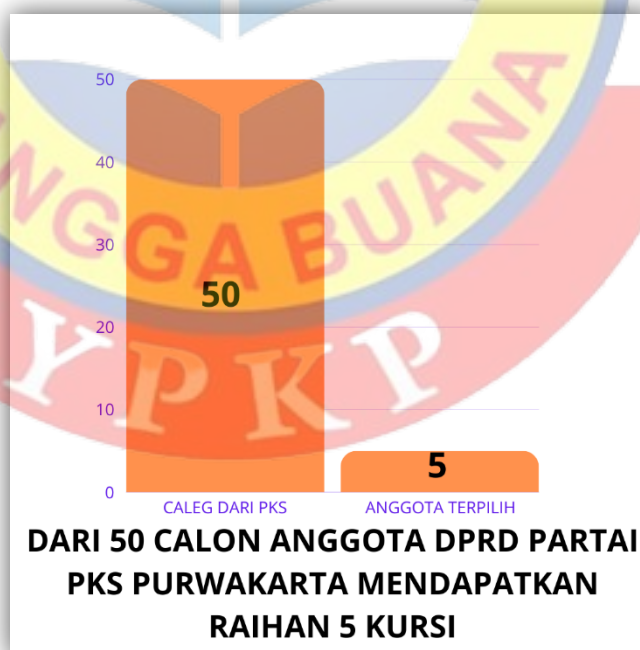
Melihat pada data yang ada bahwa PKS yang memiliki calon anggota lulusan perguruan tinggi sekitar 27 calon anggota dan dari 27 anggota tersebut yang akhirnya mendapatkan kursi hanya 3 anggota saja, penemuan ini menarik peneliti bagaimana strategi partai dalam melihat peristiwa tersebut? Apalagi jika dilihat perbandingan dari 27 calon lulusan perguruan tinggi yang diusung PKS cukup banyak.

Dari total keseluruhan calon anggota yang diusung PKS sekitar 50 calon dan hanya terpilih 5 anggota 3 sebagai anggota lulusan perguruan tinggi 2 lainnya bertamatan sekolah SMA/SMK Sederajat.



**Gambar 1.12 Calon Anggota PKS Lulusan Perguruan Tinggi Yang Terpilih**

Sumber : info *metode sainte laque*.



**Gambar 1.13 Data Calon Anggota PKS Yang Mendapatkan Kursi**

Sumber : info *metode sainte laque*.

Berangkat dari realitas yang terjadi situasi politik saat ini sedang mengalami tarik menarik kepentingan, dimana syarat dalam penentuan tingkat pendidikan terhadap calon anggota DPR masih dapat ditinjau kembali. Maka berdasarkan uraian di atas mengingat betapa pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPR yang didukung dengan kualitas pendidikan yang baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji secara lebih detail dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Berbasis Pada Pendidikan Perguruan Tinggi : Studi Kasus Pada Partai Keadilan Sejahtera Di Kab Purwakarta.”** Dengan begitu peneliti berharap Penelitian ini menjadi penting dan bermakna karena dapat memberikan informasi atau wawasan terhadap masyarakat dalam pemahaman komunikasi politik dalam menjalankan tugas fungsi serta wewenang wakil rakyat yang masyarakat pilih, dan calon anggota legislatif maupun anggota legislatif itu sendiri. Namun saya sebagai penulis juga menyadari bahwa kekurangan dari penelitian ini dan tidak bermaksud mendiskriminasi pendidikan sebagaimana adanya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana penentuan tingkat pendidikan sebagai syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat mampu menunjang komunikasi partai politik? Terlebih melihat bagaimana faktor partai yang menentukan kelayakan calon dari pendidikan yang menjadi poin utama dari penelitian ini dibuat berfokus pada daerah Kabupaten Purwakarta.

Dari beberapa uraian pemikiran yang telah peneliti rangkum pada latar belakang dan fokus penelitian diatas, sehingga peneliti merumuskan masalah sebagai berikut?



1. Apakah pendidikan formal calon anggota DPRD menjadi tolok ukur partai PKS di Purwakarta?
2. Mengapa tingkat pendidikan calon anggota DPRD Purwakarta menjadi modal sebagai alat Strategi Komunikasi Politik?
3. Bagaimanakah pendidikan formal calon anggota DPRD Kab. Purwakarta dapat mewakili masyarakat sebagai konsituen?

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian pemikiran yang telah peneliti rangkum pada latar belakang dan Rumusan Masalah diatas, sehingga peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut?

1. Bagaimana penentuan tingkat pendidikan sebagai syarat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempengaruhi kelayakan calon dan efektivitas mereka dalam peran tersebut?
2. Bagaimana syarat pendidikan calon legislatif mempengaruhi komunikasi dan dinamika internal partai politik dalam proses pemilihan dan pencalonan?
3. Apa peran faktor-faktor internal partai politik dalam menentukan kelayakan calon berdasarkan pendidikan, khususnya di daerah Kabupaten Purwakarta, dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap proses seleksi calon legislatif?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan target yang hendak dicapai dalam melakukan suatu kegiatan. Maka tujuan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep strategi komunikasi partai politik caleg melalui latar belakang tingkatan pendidikan caleg DPRD Purwakarta.
2. Untuk mengetahui konsep ideal tingkat pendidikan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kab. Purwakarta.

3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan standarisasi syarat minimal pendidikan calon anggota DPR.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, dapat memperkaya serta menambah literasi dan melengkapi khazanah Ilmu Komunikasi, khususnya tentang kajian persepsi dari studi kasus dalam representasi atau gambaran latar belakang pendidikan caleg Kab. Purwakarta. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk membandingkan dan juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa.

#### 2. Kegunaan Praktis

##### a) Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti mengenai komunikasi politik dan mengetahui betapa pentingnya pendidikan juga serta menerapkan teori – teori yang didapat serta melatih kemampuan berpikir secara sistematis.

##### b) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai komunikasi politik dalam bermasyarakat agar masyarakat mampu mengetahui dan memfilterisasi para calon wakil rakyat yang berkualitas melalui kajian akademik.

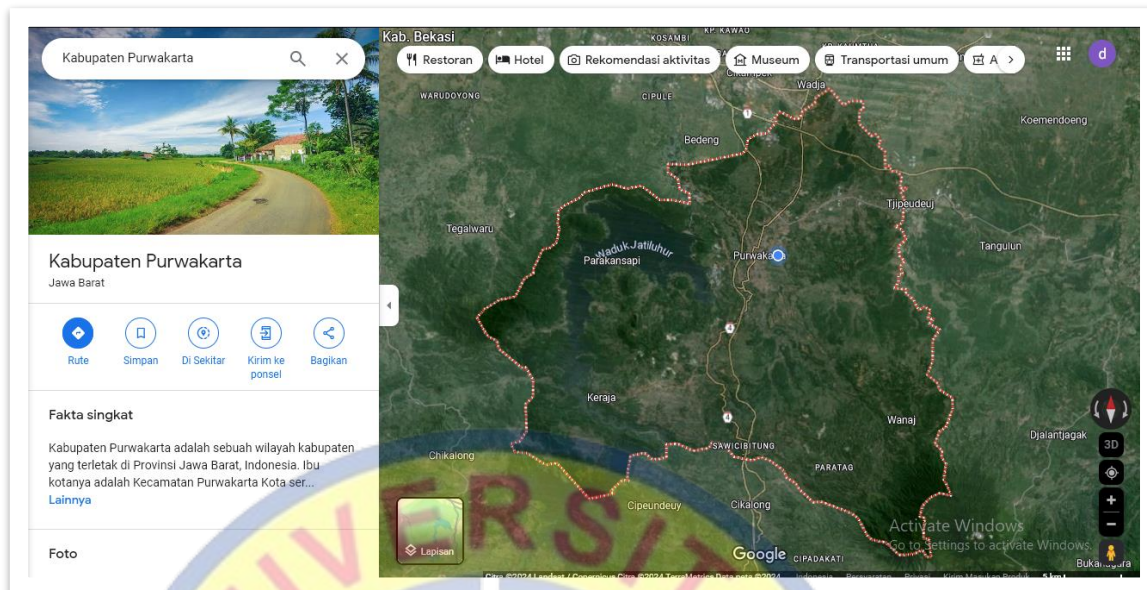
## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian skripsi, lokasi dan waktu penelitian.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari rangkuman teori, kajian atau penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran.
3. BAB III METODE PENELITIAN, teori dari pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, informan kunci, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
5. BAB V PENUTUP, terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

## 1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. yang meliputi DPD Partai Politik PKS di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kab. Purwakarta, Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan fenomena – fenomena yang tertera pada latar belakang penelitian, disamping itu yang menjadi lokasi penelitian ini juga merupakan tempat peneliti lahir serta terdorongnya ingin memberi sumbangsih literasi atau edukasi untuk Kab. Purwakarta. Hal ini merupakan bentuk kepedulian peneliti terhadap kampus tempat menimba ilmu peneliti untuk kembali pada masyarakat, sebelum akhirnya peneliti melakukan penelitian yang lebih luas.



**Gambar 1.14** Peta Lokasi Kab Purwakarta dari Maps Satelit Google

Sumber : Maps Satelit Google



**Gambar 1.15** Lokasi DPD PKS Kab Purwakarta dari Maps Satelit Google

Sumber : Maps Satelit Google

Adapun rincian waktu proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dipaparkan melalui tabel dibawah ini:

No.	Aktivitas	Sub Aktivitas	Bulan
1	Tahap Persiapan Penelitian	Konsultasi Judul Penelitian	Maret
		ACC Judul Penelitian	Maret
		Mengumpulkan Data	Maret
		Kunjungan Ke Perpustakaan	Maret
		Penyusunan BAB I	Maret
2	Penyusunan Usulan Penelitian	Revisi BAB I	April
		ACC BAB I & Observasi	April
		Penyusunan BAB II	April
		Penyusunan BAB III	Mei
		Revisi BAB II dan BAB III	Mei
		ACC BAB II dan BAB III	Mei
3	Sidang UP	Persiapan Sidang Usulan	Mei
		Sidang Usuan Penelitian	Mei
	Penyusunan Skripsi	Kunjungan Penelitian dan	Juni
		Pengumpulan data penelitian	July
		Penyusunan BAB IV	July
		Revisi BAB IV	July
		ACC BAB IV	July
		Penyusunan BAB V	July
		Revisi BAB V	July
	ACC BAB V	July	
4	Sidang Skripsi	Persiapan Sidang Akhir	Agustus
		Sidang Akhir	Agustus

**Tabel 1.1 Rincian Waktu Penelitian**

Sumber Data: di olah peneliti